



Framing Media Dan Dinamika Opini Publik  
Terkait Pengungsi Rohingya Di Indonesia: Perspektif  
UNHCR Dan Otoritas Aceh Dalam Sorotan Kritis

**Subria Mamis**

Institut Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari  
subriamamis@iainkendari.ac.id

**Ahmad Sultra Rustan**

Institut Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari  
sultra1964@gmail.com

**Sri Hadijah Arnus**

Institut Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari  
hadijaharnus@gmail.com

**Hasan Basri**

Institut Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari  
hasanbasri.iainkendari@gmail.com

**Abstract:** *This research analyzes media framing regarding the rejection and acceptance of Rohingya as refugees in Indonesia. The research focuses on the framing of news coverage issued by UNHCR and the Aceh District Government, as well as other media that explicitly voice rejection of the presence of the Rohingya. Content analysis was used as the main approach to investigate how this issue was presented and further explored in the media so that differences in media were observed in depicting this topic. The research results show that UNHCR views the Rohingya as an entity that has the right to be welcomed in Aceh, based on Human Rights principles and the belief that their presence will not exploit conditions in Aceh. On the other hand, the news framing that rejects the presence of the Rohingya comes from justification for Indonesia's non-participation in signing the refugee convention, which is interpreted as the basis that Indonesia is not obliged to accept the Rohingya. The Aceh Regional Revenue and Expenditure Budget allocation for*



*handling the flood disaster strengthens the reasons for rejection, accompanied by firm demands from the Aceh District Government for the Indonesian government to respond to this policy. The urgency of this research lies in the need for an in-depth understanding of the dynamics of media framing which can shape public opinion and influence government policy regarding humanitarian issues in local, regional, and even international contexts.*

**Keywords :** Media Framing, Humanitarian Issues, Government Policies, Refugee Convention, Rohingya Refugees

**Abstrak:** *Penelitian ini menganalisis framing media terkait penolakan dan penerimaan Rohingya sebagai pengungsi di Indonesia. Penelitian berfokus pada framing liputan berita yang dikeluarkan UNHCR dan Pemerintah Kabupaten Aceh (Pemkab Aceh), serta media lain yang secara eksplisit menyuarakan penolakan terhadap kehadiran Rohingya. Analisis konten digunakan sebagai pendekatan utama untuk menyelidiki bagaimana isu ini disajikan dan dieksplorasi lebih jauh dalam media sehingga perbedaan media teramati dalam menggambarkan topik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNHCR memandang Rohingya sebagai entitas yang berhak diterima di Aceh, berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan keyakinan bahwa kehadiran mereka tidak akan mengeksploitasi kondisi di Aceh. Di sisi lain, framing berita yang menolak kehadiran Rohingya berasal dari alasan justifikasi ketidakpartisipan Indonesia dalam penandatanganan konvensi pengungsi, yang diartikan sebagai dasar bahwa Indonesia tidak berkewajiban menerima Rohingya. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh untuk penanganan bencana banjir memperkuat alasan penolakan, didampingi dengan tuntutan tegas dari Pemerintah Kabupaten Aceh kepada pemerintah*



*Indonesia untuk merespons kebijakan ini. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan pemahaman mendalam terhadap dinamika framing media yang mampu membentuk opini publik dan memengaruhi kebijakan pemerintah terkait isu kemanusiaan dalam konteks lokal, regional, bahkan internasional.*

**Kata Kunci:** Framing Media, Isu Kemanusiaan, Kebijakan Pemerintah, Konvensi Pengungsi, Pengungsi Rohingya

## **Pendahuluan**

Kedatangan etnis Rohingya di Indonesia pada tahun 2023 telah menjadi fokus utama perhatian publik, mencapai tingkat viralitas yang signifikan. Fenomena ini mencatat peningkatan jumlah yang substansial jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang dapat diukur secara terbatas. Ketibaan etnis Rohingya yang sekarang mencapai jumlah 1.684 pengungsi di November 2023.<sup>1</sup> Ini tidak hanya menciptakan keresahan di kalangan masyarakat Aceh, sebagai lokus kedatangan, melainkan juga menarik perhatian luas masyarakat Indonesia pada umumnya.

Ketidaknyamanan yang timbul dari kedatangan ini semakin diperparah oleh tindakan beberapa anggota etnis Rohingya yang dianggap tidak mematuhi norma-norma etika

---

<sup>1</sup>Tim Detik, Sumut. *detik.com*. 16 Desember Sabtu, 2023. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7091784/harapan-jk-agar-indonesia-terima-ribuan-pengungsi-rohingya> (accessed 21 Desember 2023).



dan perilaku yang diharapkan dari pengungsi. Tindakan seperti pembuangan bahan makanan ke laut, upaya pelarian dari fasilitas pengungsian, kurangnya perhatian terhadap prinsip-prinsip sanitasi, dan insiden perilaku tidak senonoh terhadap anak-anak di wilayah Aceh,<sup>2</sup> ditambah lagi dengan pelanggaran syariat Islam, bercampurnya laki dan perempuan<sup>3</sup> turut memberikan dimensi tambahan pada dinamika kontroversial isu ini. Kompleksitas permasalahan ini menjadi perhatian utama dalam perbincangan publik, menyelidiki implikasi sosial, politik, dan etika yang terkait dengan kedatangan etnis Rohingya di Indonesia.

Sejatinya, Rohingya merupakan sebuah kelompok etnis yang berdiam di wilayah negara bagian Arakan/Rakhine sejak abad ke-7 Masehi, diidentifikasi oleh istilah "Rohingya" yang diperkenalkan oleh peneliti Inggris Francis Hamilton pada abad ke-18. Meski sebelumnya dikenal sebagai Arakan, nama wilayah ini berubah menjadi Rakhine pada tahun 1930. Penting untuk dicatat bahwa sebutan "Rakhine" lebih merujuk

---

<sup>2</sup>Sumitro, Fria. *4 Kelakuan Buruk Pengungsi Rohingya Aceh, Buang Bantuan-Kabur dari Kamp*. 6 Desember Rabu, 2023. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7074619/4-kelakuan-buruk-pengungsi-rohingya-aceh-buang-bantuan-kabur-dari-kamp> (accessed 21 Desember 2023).

<sup>3</sup> Mubarak, Zaki; Hidayat, Taufik. *aceh.tribunnews.com*. 8 Desember Kamis, 2023. <https://aceh.tribunnews.com/2022/12/08/warga-resah-rohingya-melanggar-adat-hingga-mencuri-kelapa> (accessed 21 Desember 2023).



kepada etnis Rakhine Buddhist, dan tidak mencakup identitas etnis Rohingya yang sebagian besar beragama Islam. Etnis Rohingya, tersebar di berbagai negara, mengalami penurunan jumlah akibat pengungsian dan pencarian suaka, sering kali melalui perjalanan laut yang berisiko, bahkan mereka yang bertahan di Arakan sering menjadi korban pembersihan etnis.<sup>4</sup>

Penolakan ini menciptakan tugas berat bagi pihak berwenang dan pemangku kebijakan untuk menangani dan merespons secara bijaksana atas kekhawatiran masyarakat. Pemahaman mendalam terhadap masalah lokal, dialog terbuka dengan masyarakat, serta upaya yang transparan dan berkelanjutan menjadi langkah-langkah penting yang diinginkan menanggapi dinamika isu Rohingya yang berkembang seiring dengan waktu.

Di sisi lain, organisasi internasional, PBB Bidang Pengungsian—*United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) secara kategoris menghukum tindakan kekerasan sistematis terhadap komunitas Rohingya sebagai manifestasi pelanggaran hak asasi manusia dan potensi terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. Organisasi Kemanusiaan tersebut bahkan meyakinkan bahwa Pengungsi Rohingya tidak memasuki wilayah Indonesia dengan niat

---

<sup>4</sup> Susetyo, Heru, Heri Aryanto, and Mutiara Ryan Wasti. *Rohingya : Suara Etnis yang Tidak Boleh Bersuara*. Jakarta Timur: Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM), Mei 2013.



untuk mengeksploitasi atau menyalahgunakan keramahan masyarakat Indonesia.<sup>5</sup>

Di konteks Aceh, penerimaan awal dan bantuan yang diberikan oleh warga kepada pengungsi Rohingya, didasarkan pada dasar solidaritas agama, melibatkan pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas antar-umat beragama. Namun, pergeseran sentimen masyarakat dari empati menjadi kekhawatiran yang melibatkan dampak sosial, ekonomi, dan aspek keamanan, disebabkan peningkatan jumlah kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia yang menimbulkan kecemasan akan keterbatasan sumber daya lokal, ketidakpastian seputar integrasi, dan dampak jangka panjang dari penambahan populasi pengungsi seperti biaya ekonomi pengungsi, serta adanya persepsi ketidakadilan dalam distribusi bantuan. Demonstrasi penolakan oleh warga Aceh terhadap kedatangan Rohingya<sup>6</sup>, ditambah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh yang mendesak relokasi bagi

---

<sup>5</sup> Pratiwi, Fuji. *UNHCR: Pengungsi Rohingya Tangguh, tak Berniat Eksploitasi Indonesia*. 2 Desember 2023, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/s5192k457/unhcr-pengungsi-rohingya-tangguh-tak-berniat-eksploitasi-indonesia> (accessed 21 Desember 2023).

<sup>6</sup> Jamal, Pangwa. *news.okezone.com*. 20 Desember Rabu, 2023. <https://video.okezone.com/play/2023/12/20/1/175310/ratusan-masyarakat-pidie-aceh-demo-tolak-pengungsi-rohingya> (accessed 21 Desember 2023).



pengungsi<sup>7</sup> mencerminkan ekspresi ketidaksetujuan terhadap dampak kehadiran pengungsi di wilayah tersebut.

Dikarenakan sifat kontroversial isu ini, media memiliki peran sentral dalam membentuk persepsi publik, memengaruhi opini masyarakat, dan bahkan menentukan agenda politik. Media menjadi saluran utama mengkomunikasikan informasi terkait konflik tersebut. Maka, Peneliti melakukan tinjauan dan analisis terhadap framing media yang berkaitan dengan penerimaan atau penolakan pengungsi Rohingya, sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat.

Artikel terkait Rohingya pernah diteliti sebelumnya oleh Vu dan Lynn yang mengkaji pers elite dari tiga negara dalam membingkai krisis pengungsi Rohingya pada tahun 2017.<sup>8</sup> Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa Harian *The Irrawaddy* (Myanmar) cenderung menyisipkan narasi nasionalis ke dalam konten berita, merendahkan kekerasan yang digunakan terhadap Rohingyas; Sementara, Harian *The*

---

<sup>7</sup> Nursalikah, Ani. *news.republika.co.id*. 20 Desember Rabu, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/s5ys0h366/pemkab-aceh-timur-desak-unhcr-relokasi-imigran-rohingya> (accessed 21 Desember 2023).

<sup>8</sup> Vu, Hong Tien, and Nyan Lynn. "When the News Takes Sides: Automated Framing Analysis of News Coverage of the Rohingya Crisis by the Elite Press from Three Countries." *Journalism Studies* (<https://www.tandfonline.com/>) 21, no. 9 (Maret 2020): 1284-1304, DOI 10.1080/1461670X.2020.1745665.



*New Nation* (Bangladesh) membingkai krisis sesuai dengan prioritas negara, memfokuskan liputannya pada aspek kemanusiaan krisis; dan Harian *The New York Times* menggunakan wacana hegemoni Barat. Ketiga temuan tadi dibahas dengan menggunakan perspektif pengaruh ideologis dan budaya.

Studi selanjutnya oleh Irom, Borah, Vishnevskaya, & Gibbons mengkaji kerangka berita, sumber berita, dan karakteristik pengungsi dalam liputan krisis pengungsi Rohingya di empat negara. Temuan menunjukkan bahwa kerangka berita yang menyoroti korban, tematik, dan administratif paling umum digunakan. Politisi, organisasi internasional, dan LSM menjadi sumber berita dominan, dengan kewarganegaraan, usia, dan jenis kelamin sebagai karakteristik pengungsi yang sering disorot. Studi ini menyarankan praktik positif untuk jurnalis, termasuk lebih sering menggunakan kerangka tematik dan personal untuk memberikan latar belakang holistik terhadap krisis dan menciptakan representasi yang lebih nuanced atau kompleks terhadap subjek pengungsi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Irom, Bimbisar, Porismita Borah, Anastasia Vishnevskaya, and Stephanie Gibbons. "News Framing of the Rohingya Crisis: Content Analysis of Newspaper Coverage from Four Countries." *Journal of Immigrant & Refugee Studies* (<https://www.tandfonline.com/>) 20, no. 1 (April 2022): 109-124.





Penelitian ini, berbeda dengan dua penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada tiga aspek negara atau lembaga yang berbeda. Secara khusus, Peneliti mengeksplorasi dua aspek yang relevan: pemingkiaan terhadap UNHCR yang meresepsi Rohingya dan penolakan yang berasal dari warga beserta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam mendalami konstruksi media terhadap isu Rohingya. Harapannya, hasil penelitian dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan perspektif yang lebih seimbang, kritis, dan terinformasi terkait isu yang polemik. Selain itu, pemahaman mendalam terhadap media juga memberikan wawasan terkait perkembangan berita politik dan keterlibatan aktor politik dalam merespons atau memanfaatkan isu ini sesuai dengan kepentingan mereka. Dengan pemahaman yang matang, diharapkan masyarakat mampu membentuk pandangan yang lebih kontekstual dan berkontribusi pada diskusi yang konstruktif mengenai isu kemanusiaan, serta memberikan kontribusi bagi peran pemerintah dalam menangani isu krusial ini.

### **Metode Penelitian**

Tulisan ini menggunakan metode analisis isi, dimulai dengan identifikasi elemen-elemen framing yang digunakan



dalam konten berita, yang kemudian diikuti dengan analisis mendalam terhadap isi berita guna memahami bagaimana proses framing isu Rohingya membentuk persepsi dan interpretasi pembaca.

Disebabkan ingin mengetahui bagaimana pemetaan berita di Indonesia tentang kasus Rohingya, pemilihan metode ini didasarkan pada kesesuaian sifat konten media yang menjadi fokus penelitian. Selama penelitian, peneliti secara aktif mengumpulkan sampel berita dari berbagai media yang meliput isu Rohingya. Pemilihan sampel berita kemudian dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan representativitas dan diversitas dalam pbingkaihan isu tersebut.

Jumlah sampel berita disesuaikan dengan skala dan ruang lingkup isu Rohingya. Tulisan ini mengkomparasikan cara framing media (1) Bingkai UNHCR yang mempertahankan Rohingya, (2) Bingkai Warga dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh yang menolak Rohingya.

Peneliti mengkomprasikan pbingkaihan-pbingkaihan media disebabkan perbedaan kebijakan oleh masing-masing media dalam kasus pro dan kontra yang mengaitkan hampir seluruh aspek kehidupan, mulai geopolitik, sosial, budaya, agama, ketahanan negara,



kebijakan nasional, ratifikasi internasional, yang dengan semua ini memviralkan isu Rohingya di Indonesia.

Peneliti melakukan pencarian di *Search Engine Google* dan mencari kata **Rohingya**, dan kemudian masuk di kategori News. Algoritma google memperlihatkan 87 hasil dalam 0.47 detik. Peneliti melakukan **setelan Custom Tool** yang kemudian di lakukan *customased date range* pada tanggal 2 Januari 2023 yang menampilkan sekitar 56.400 hasil (0,37 detik).

Untuk mengumpulkan data, Peneliti mengetik kata utama 'Rohingya' lalu mengklasifikasikannya ke dalam Rohingya Aceh dan Rohingya UNHCR. Setelah menelusuri, Peneliti mendapatkan beberapa artikel yang terkait Rohingya. Selanjutnya, Peneliti membuat timeline/periode waktunya secara spesifik. Terakhir adalah kategorisasi dari seleksi artikel berita yang disesuaikan dengan penelitian. Tahapan yang dilakukan peneliti tidak melulu berurutan namun bisa bolak balik.

### **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelusuran dari berita Rohingya dan Politik Indonesia, secara garis besar, Peneliti menemukan dua framing utama. Pertama, Bingkai UNHCR yang menerima Rohingya dan penolakan warga dan Pemerintah Kabupaten Aceh terhadap Rohingya.



Penemuan Pertama dengan memotret framing UNHCR. UNHCR memberikan ulasan terkait fakta warga Rohingya dan menyoroti upaya-upaya kemanusiaan, organisasi non-pemerintah, atau lembaga internasional yang terlibat dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada pengungsi Rohingya di berbagai tempat, termasuk Indonesia. Keamanan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak pengungsi harus menjadi perhatian bersama untuk membantu mereka mengatasi tantangan yang dihadapi dan membangun masa depan yang lebih baik.<sup>10</sup>

Potret UHNCR memperlihatkan Juffrian Seorang pengungsi anak Rohingya sedang duduk di dalam bus yang tampak di gambar 1 dan gambar 2.

---

<sup>10</sup> UHNCR. *14 Fakta Mengenai Pengungsi Rohingya*. 2023. <https://www.unhcr.org/id/54329-14-fakta-mengenai-pengungsi-rohingya.html>.



## 14 Fakta Mengenai Pengungsi Rohingya

5 Dec 2023



**Gambar 1. Potret UNHCR terhadap Warga Rohingya**

1. Selama beberapa dekade, warga Rohingya menderita penderitaan ekstrem di Myanmar. Mereka tidak diberikan akses terhadap kewarganegaraan dan pencatatan; tidak diperbolehkan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja; dibatasi dalam kamp dan desa; dan menjadi sasaran kekerasan ekstrem.
2. Pengungsi Rohingya tidak ingin meninggalkan Myanmar. Mereka terpaksa pengungsi. Kebanyakan pengungsi Rohingya mengatakan kepada UNHCR bahwa mereka berharap dapat pulang ke Myanmar jika kondisinya memungkinkan.
3. Sebagian besar pengungsi Rohingya – sekitar 1 juta orang – melarikan diri ke kamp-kamp di negara tetangga Bangladesh sejak tiga dekade terakhir dan kebanyakan pada tahun 2017 setelah beberapa insiden kekerasan dan pelanggaran HAM berskala besar. Kondisi keamanan di kamp-kamp Bangladesh yang sesak telah memburuk secara signifikan selama beberapa waktu terakhir, mendorong banyak keluarga pengungsi Rohingya untuk melakukan perjalanan yang sangat berbahaya dalam mencari keselamatan dan stabilitas.
4. Pengungsi Rohingya tidak hanya mencari keselamatan di Indonesia. Mayoritas pengungsi Rohingya telah melarikan diri dan diberi status pengungsi di Bangladesh (>960.000), Malaysia (>107.000), dan India (>22.000).
5. Karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan, tidak ada jalur legal yang memungkinkan pengungsi Rohingya untuk berpindah-pindah wilayah dengan mudah di kawasan ini. Akibatnya, mereka sering memilih perjalanan perahu berbahaya yang ditawarkan oleh para penyelundup manusia.
6. Lebih dari 70% pengungsi Rohingya yang mendarat di Indonesia selama sebulan terakhir adalah perempuan dan anak-anak.
7. Perjalanan dengan kapal dapat memakan waktu berminggu-minggu, sering kali menggunakan kapal yang tidak layak untuk berlayar dan tidak dilengkapi cukup makanan, air bersih, atau sanitasi. UNHCR juga mendapat laporan kekerasan fisik dan seksual di atas kapal.
8. Pengungsi Rohingya terus mencari keselamatan dengan menempuh perjalanan kapal yang berbahaya di laut meskipun telah mengetahui risikonya. Tahun lalu, 2022, adalah salah satu tahun paling mematikan dalam sejarah pergerakan maritim pengungsi Rohingya di Asia Tenggara, dengan 348 orang secara tragis dipastikan tewas atau hilang, termasuk anak-anak.



### Gambar 2. Potret UNHCR terhadap Fakta Warga Rohingya

Bukan hanya melihat dari Potret UHNCR dalam situs beritanya secara mandiri, peneliti menelisik dari berita lain seperti Republika yang memotret persepsi UNHCR terkait kasus Rohingya yang mencerminkan sikap para pengungsi Rohingya yang berusaha mencari kehidupan baru dan *tidak ingin menimbulkan masalah atau eksploitasi di negara penampungan*.<sup>11</sup> Potret Republika terlihat pada Gambar 3.

---

<sup>11</sup> Pratiwi, Fuji. *UNHCR: Pengungsi Rohingya Tangguh, tak Berniat Eksploitasi Indonesia*. 2023. <https://news.republika.co.id/berita/s5192k457/unhcr-pengungsi-rohingya-tangguh-tak-berniat-eksploitasi-indonesia>.



**Gambar 3 Republika memotret UHNCR**

Bukan tanpa sebab, ketidakakuanan status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya telah menimbulkan konsekuensi serius dalam bentuk diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, menghasilkan gelombang pengungsian massal dari Rakhine ke negara-negara sekitar Myanmar, termasuk Banglades, Thailand, Malaysia, dan



Indonesia. Besarnya jumlah pengungsi ini berdampak signifikan pada negara penerima, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya<sup>12</sup>.

Framing selanjutnya adalah Penolakan Warga Indonesia dan Memberikan solusi untuk para Pengungsi Rohingya di Aceh, yang dikategorisasikan menjadi 3 motif :

C.1 Senator Syech Fadhil menekankan pentingnya peran Pemerintah Pusat di Jakarta dalam mencari solusi nyata terkait kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh. Ia berpendapat bahwa ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah di Aceh.

C.2 Selanjutnya, kekhawatiran bahwa Pemerintah Aceh saat ini fokus menangani masalah banjir bandang yang melanda beberapa daerah di Aceh. Ini menunjukkan adanya tekanan ganda terhadap pemerintah daerah untuk menanggapi dua situasi krisis yang berbeda.

C.3 Pemerintah Aceh menekankan isu mendesak mempengaruhi APBD Pemerintah Provinsi Aceh. Senator Syech Fadhil juga menyebutkan bahwa Pemkab

---

<sup>12</sup> Budaya, Budi. "Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingnya Di Myanmar terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar." *JURNAL MAKSIMAGAMA ILMIAH HUKUM* (Universitas Wisnuwardhana) 11, no. 1 (Mei 2017): 106- 120.





(Pemerintah Kabupaten) dan Pemprov (Pemerintah Provinsi) di Aceh sedang fokus menangani masalah lain, termasuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta masalah-masalah lainnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa situasi di Aceh sedang kompleks dengan adanya sejumlah isu mendesak<sup>13</sup>. Potret media terhadap hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.

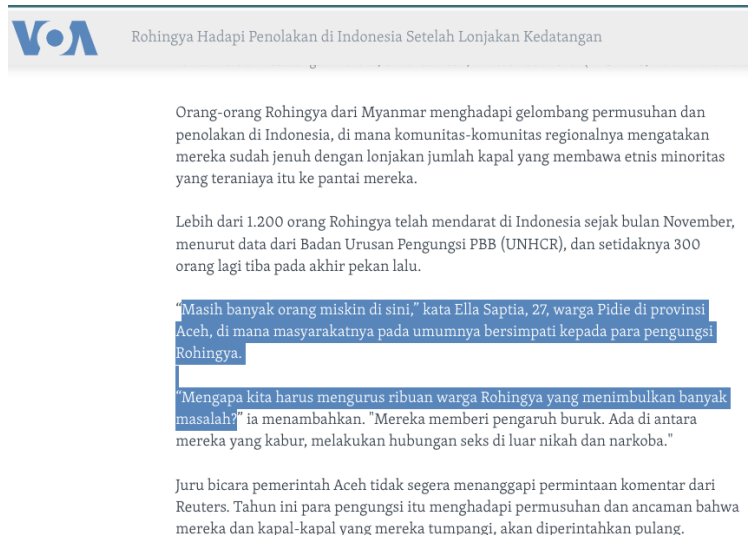


**Gambar 4. Framing Berita dari Pemerintah Aceh**

<sup>13</sup> Safrina. *Harus Ada Solusi Kongkrit Soal Rohingya di Aceh*. 2023. <https://acehprov.go.id/berita/kategori/sosial-kemasyarakatan/harus-ada-solusi-kongkrit-soal-rohingya-di-aceh>.



Dari hasil analisis ini, interpretasi yang hati-hati terhadap dampak dari framing dalam konten berita menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana media membentuk persepsi dalam masyarakat, sekaligus opini terkait isu Rohingya. Terlihat dari isu yang ditonjolkan dalam berita bahwa bukan hanya Pemerintah Aceh, Penduduk Aceh pun memandang Rohingya mempersulit keadaan Aceh<sup>14</sup>. Potret Harian VOA terkait framing keluhan warga Aceh dapat dilihat di gambar 5.



**Gambar 5 Framing Berita terkait Keluhan Penduduk Rohingya**

<sup>14</sup> REUTERS, and Riska Munawarah. *Rohingya Hadapi Penolakan di Indonesia Setelah Lonjakan Kedatangan*. 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/rohingya-hadapi-penolakan-di-indonesia-setelah-lonjakan-kedatangan/7392976.html>.



Mengenai framing media, berita Rohingya dan dampaknya pada kebijakan pemerintah di Indonesia menyoroti peran krusial media massa dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap isu pengungsi. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada liputan media terkait Rohingya di Indonesia, penelitian ini mengidentifikasi dua framing utama: framing positif, yang menekankan aspek kemanusiaan dan perlindungan terhadap pengungsi Rohingya, dan framing negatif, yang menyoroti ketidakpastian keamanan atau potensi dampak ekonomi yang merugikan dari keberadaan mereka.

Indonesia, meskipun tidak mengakui secara resmi status pengungsi dan tidak menandatangani Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951, telah menunjukkan penolakan terhadap menerima Rohingya sebagai suaka dengan pendekatan yang lebih selektif. Meskipun tidak ada kewajiban hukum yang mengikat Indonesia untuk memberikan suaka kepada pengungsi Rohingya, negara ini tetap aktif memberikan bantuan dan perlindungan, meskipun dengan batasan tertentu.

Penolakan tersebut tercermin dari ketidakformalan dalam pengakuan status pengungsi dan keterbatasan dalam memberikan hak-hak formal yang diatur oleh konvensi tersebut. Meskipun adanya tindakan kemanusiaan, penolakan



tersebut mencerminkan ketidaksetujuan terhadap konsep pengungsi dalam konteks hukum internasional yang diakui oleh sebagian besar negara. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji lebih lanjut dampak dan implikasi dari penolakan ini terhadap hak dan kesejahteraan para pengungsi Rohingya, serta dinamika hubungan internasional Indonesia dalam menghadapi isu pengungsi di tingkat regional dan global<sup>15</sup>.

Dalam konteks kasus penolakan dan penerimaan Rohingya di Indonesia, kajian jurnalistik ini menjadi sangat penting karena dapat membuka wawasan mengenai bagaimana framing berita dapat memengaruhi persepsi publik dan pada gilirannya, membentuk kebijakan pemerintah terkait. Dengan menganalisis kerangka alamiah dan sosial dalam pemberitaan, kajian jurnalistik dapat mengidentifikasi bagaimana media menyajikan peristiwa tersebut, apakah sebagai kejadian fisik semata atau sebagai dampak dari interaksi sosial.

Sehingga, framing terbukti mampu mempertimbangkan keseluruhan proses komunikasi, dengan segala aspeknya, yang kemudian menjembatani perspektif

---

<sup>15</sup> Sahana, Mehebut, Selim Jahangir, and MD Anisujjaman. "THE ROHINGYA CRISIS – DEMOGRAPHY & IDENTITY Forced Migration and the Expatriation of the Rohingya: A Demographic Assessment." *Journal of Muslim Minority Affairs* (Taylor & Francis Online) Volume 39, no. 1 (2019): 40-60 <https://doi.org/10.1080/13602004.2019.1587952>.



yang berbeda (interdisipliner). Bukan hanya itu, framing mampu “menerobos hambatan komunikasi”. Lebih lanjut, banyak pakar juga memiliki harapan normatif bahwa mempelajari framing akan membantu mengembangkan strategi komunikasi (untuk khalayak sasaran), membangun konsensus, dan mendukung suatu tindakan<sup>16</sup>.

Urgensi kajian ini terletak pada pemahaman mendalam terhadap cara framing berita dalam menciptakan naratif yang memengaruhi opini masyarakat dan kebijakan pemerintah terhadap pengungsi Rohingya. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan framing media dapat membantu masyarakat lebih kritis dalam mengonsumsi berita dan merespon isu-isu kemanusiaan secara lebih baik.

Menelisis lebih lanjut pada kajian jurnalistik ini, frame tak lain menjadi segmen-segmen pola pikir yang membimbing individu dalam menafsirkan kenyataan<sup>17</sup>. Framing berita, persepsi publik, dan kebijakan pemerintah saling terkait dalam dinamika isu-isu sosial dan politik. Hal

---

<sup>16</sup> Guenther, Lars , Susan Jörges, Daniela Mahl, and Michael Brüggemann. "Framing as a Bridging Concept for Climate Change Communication: A Systematic Review Based on 25 Years of Literature." *Communication Research* (Sage Journals) 25, no. 1 (2023): <https://doi.org/10.1177/00936502221137165>).

<sup>17</sup> Erving, Goffman. *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Harvard University Press, 1974.



ini memberikan arah kepada kita semua untuk meninjau kembali teori framing, oleh Erving Goffman, yang menyatakan bahwa media memilih aspek-aspek tertentu untuk ditekankan dalam penyajian informasi, dan membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu isu.

Lebih lanjut, ketika kita telaah lagi framing berita mengenai isu pengungsi Rohingya, dapat menciptakan persepsi kemanusiaan atau keamanan nasional di kalangan publik. Persepsi yang secara terstruktur dibingkai berdampak pada opini masyarakat, yang kemudian mempengaruhi pembentukan kebijakan pemerintah atas perlakuan masyarakat sebagai efek perilaku dari pemberitaan di media. Keterlibatan teori framing menjadi landasan konseptual yang penting untuk memahami hubungan yang kompleks antara framing berita, persepsi publik, dan kebijakan pemerintah yang diharapkan lebih responsive dengan isu Rohingya ini.



## Simpulan

Dinamika kompleks antara pemberitaan yang mengacu pada penolakan dan perlindungan terhadap kelompok Rohingya, seringkali cenderung menciptakan naratif yang menekankan pandangan negatif atau sikap menolak terhadap kehadiran mereka di Indonesia. Framing semacam ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mengambil sikap yang lebih ketat terhadap kelompok pengungsi tersebut.

Di sisi lain, berita yang mempertahankan Rohingya cenderung menekankan aspek kemanusiaan dan perlindungan terhadap kelompok tersebut. Framing yang menciptakan naratif positif tentang kontribusi Rohingya atau menceritakan penderitaan mereka dapat memobilisasi opini publik untuk mendukung upaya bantuan dan pemeliharaan hak asasi manusia.

Begitu juga, pemerintah dapat merespon tekanan opini publik yang dibentuk oleh framing media. Jika pemberitaan menunjukkan bahwa masyarakat mendukung penolakan terhadap Rohingya, pemerintah dapat cenderung mengambil kebijakan yang lebih restriktif. Sebaliknya, jika framing media lebih mempertahankan hak dan perlindungan Rohingya, pemerintah dapat merespon dengan kebijakan yang lebih inklusif dan kemanusiaan.



Dalam keseluruhan analisis ini, terlihat bahwa framing media tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga aktif membentuk opini publik dan merancang respons kebijakan pemerintah terhadap isu pengungsi Rohingya di Indonesia. Dinamika antara framing yang menolak dan mempertahankan tersebut menjadi elemen penting dalam pembentukan naratif sosial dan kebijakan publik.

Tulisan jurnal ini memiliki keterbatasan dalam interpretasi framing media dan keterbatasan data serta sumber media yang mungkin tidak merata. Urgensi ke depannya terletak pada perlunya penelitian lebih lanjut yang menggali secara mendalam dinamika hubungan antara framing media dan kebijakan pemerintah terkait isu Rohingya di Indonesia dengan masa penelitian yang lebih lama, disertai dengan penelitian yang interdisipliner seperti melibatkan studi media, ilmu politik, dan hukum, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Keberlanjutan urgensi tulisan ini terletak pada upaya merancang kebijakan inklusif berbasis kemanusiaan dan menciptakan naratif seimbang untuk mendukung solusi berkelanjutan terhadap krisis pengungsi. Penelitian lebih lanjut perlu memfokuskan pada dampak framing media terhadap persepsi masyarakat dan kebijakan pemerintah untuk membentuk kebijakan yang responsif dan efektif.





## Daftar Pustaka

- Budaya, B. (2017, Mei). Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya Di Myanmar terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar. *JURNAL MAKSIMAGAMA ILMIAH HUKUM*, 11(1).
- Erving, G. (1974). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Harvard University Press.
- Guenther, L. , Jörges, S., Mahl, D. , & Brüggemann, M. (2023). Framing as a Bridging Concept for Climate Change Communication: A Systematic Review Based on 25 Years of Literature. *Communication Research*, 25(1), <https://doi.org/10.1177/00936502221137165>.
- Irom, B., Borah, P., Vishnevskaya, A., & Gibbons, S. (2022, April 16). News Framing of the Rohingya Crisis: Content Analysis of Newspaper Coverage from Four Countries. *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 20(1).
- Jamal, P. (2023, 20 Desember Rabu). *news.okezone.com*. Dipetik 21 Desember 2023, dari Ratusan Masyarakat Pidie Aceh Demo Tolak Pengungsi Rohingya: <https://video.okezone.com/play/2023/12/20/1/175310/ratusan-masyarakat-pidie-aceh-demo-tolak-pengungsi-rohingya>
- Mubarak, Zaki; Hidayat, Taufik. (2023, 8 Desember Kamis). *aceh.tribunnews.com*. Dipetik 21 Desember 2023, dari Serambinews.com: <https://aceh.tribunnews.com/2022/12/08/warga-resah-rohingya-melanggar-adat-hingga-mencuri-kelapa>



Nursalikh, A. (2023, 20 Desember Rabu). *news.republika.co.id*. Dipetik 21 Desember 2023, dari Pemkab Aceh Timur Desak UNHCR Relokasi Imigran Rohingya:  
<https://news.republika.co.id/berita/s5ys0h366/pemkab-aceh-timur-desak-unhcr-relokasi-imigran-rohingya>

Pratiwi, F. (2023, 2 Desember 2023). *UNHCR: Pengungsi Rohingya Tangguh, tak Berniat Eksploitasi Indonesia*. Dipetik 21 Desember 2023 2023, dari Republika:  
<https://news.republika.co.id/berita/s5192k457/unhcr-pengungsi-rohingya-tangguh-tak-berniat-eksploitasi-indonesia>

Pratiwi, F. (2023). *UNHCR: Pengungsi Rohingya Tangguh, tak Berniat Eksploitasi Indonesia* . Diambil kembali dari Republika:  
<https://news.republika.co.id/berita/s5192k457/unhcr-pengungsi-rohingya-tangguh-tak-berniat-eksploitasi-indonesia>

REUTERS, & Munawarah, R. (2023). *Rohingya Hadapi Penolakan di Indonesia Setelah Lonjakan Kedatangan*. Diambil kembali dari VOA Indonesia:  
<https://www.voaindonesia.com/a/rohingya-hadapi-penolakan-di-indonesia-setelah-lonjakan-kedatangan/7392976.html>

Safrina. (2023). *Harus Ada Solusi Kongkrit Soal Rohingya di Aceh*. Diambil kembali dari Pemerintah Aceh:  
<https://acehprov.go.id/berita/kategori/sosial-kemasyarakatan/harus-ada-solusi-kongkrit-soal-rohingya-di-aceh>

Sahana, M., Jahangir, S., & Anisujjaman, M. (2019). THE ROHINGYA CRISIS – DEMOGRAPHY &



IDENTITY Forced Migration and the Expatriation of the Rohingya: A Demographic Assessment. *Journal of Muslim Minority Affairs*, Volume 39(1), 40-60  
<https://doi.org/10.1080/13602004.2019.1587952>.

Sumitro, Fria. (2023, 6 Desember Rabu). *4 Kelakuan Buruk Pengungsi Rohingya Aceh, Buang Bantuan-Kabur dari Kamp*. Dipetik 21 Desember 2023, dari detik.com: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7074619/4-kelakuan-buruk-pengungsi-rohingya-aceh-buang-bantuan-kabur-dari-kamp>

Susetyo, H., Aryanto, H., & Wasti, M. R. (Mei 2013). *Rohingya : Suara Etnis yang Tidak Boleh Bersuara*. Jakarta Timur: Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM).

Tim Detik, S. (2023, 16 Desember Sabtu). *detik.com*. Dipetik 21 Desember 2023, dari detiksumut: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7091784/harapan-jk-agar-indonesia-terima-ribuan-pengungsi-rohingya>

UHNCR. (2023). *14 Fakta Mengenai Pengungsi Rohingya*. Diambil kembali dari UHNCR: <https://www.unhcr.org/id/54329-14-fakta-mengenai-pengungsi-rohingya.html>

Vu, H. T., & Lynn, N. (2020, Maret 24). When the News Takes Sides: Automated Framing Analysis of News Coverage of the Rohingya Crisis by the Elite Press from Three Countries. *Journalism Studies*, 21(9), 1284-1304, DOI 10.1080/1461670X.2020.1745665.